

**KOLABORASI MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT MELALUI
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI
PAGESANGAN BARAT KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM**

M Amin¹ Ikhwan Wadi², Dedy Suhendi³ Selamat Jalaluddin⁴

^{1,3,4}**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

²**Universitas Gunung Rinjani**

email: aminlombok77@gmail.com

Keyword

People's Economy,
Red and White
Cooperative

ABSTRACT

Pagesangan Barat Subdistrict in Mataram City, characterized by dense population and limited arable land, faces significant economic challenges. With only 75 hectares of dry agricultural land and a single registered cooperative in 2021, the community exhibits a weak economic institutional structure and a high dependence on social assistance, as shown by 1,019 recipients of government food aid. This community service project aimed to establish the “Kelurahan Merah Putih” cooperative as a sustainable economic platform to empower local residents. Using a participatory and educational approach, the program involved 35 participants, including local leaders and micro-entrepreneurs, over a three-month period. Key activities included cooperative education, legal establishment, democratic leadership selection, and financial management training. As a result, nine residents were appointed as cooperative administrators, and members demonstrated a 17% increase in financial literacy and understanding of cooperative governance, as verified by pre- and post-training assessments. The cooperative initiated units in daily savings-loans, collective retail, and household waste services, enhancing community participation and economic resilience. Although challenges such as limited capital and digital literacy emerged, the initiative significantly improved local economic agency and established a foundation for long-term, community-led financial institutions. The findings highlight the effectiveness of grassroots cooperative development in addressing economic vulnerability, promoting inclusive growth, and supporting SDG goals on poverty reduction, decent work, and sustainable communities.

1. Pendahuluan

Kelurahan Pagesangan Barat yang terletak di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, merupakan salah satu dari sembilan kelurahan di wilayah administratif tersebut, dengan cakupan wilayah seluas kurang lebih 63,82 hektare dan jumlah populasi sekitar 11.135 jiwa. Komposisi penduduk di daerah ini memperlihatkan keseimbangan jenis kelamin dengan rasio sekitar 97,43 persen [Ummat Repository+10Scribd+10BKKBN+10]. Meskipun demikian, kondisi geografis dan penggunaan lahan menunjukkan dominasi kawasan permukiman padat penduduk, sementara ketersediaan lahan pertanian kering yang hanya mencapai 75 hektare membatasi peluang untuk pengembangan sektor agraris secara optimal. Akibatnya, basis ekonomi berbasis pertanian sulit untuk berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap penghidupan masyarakat lokal.

Merujuk pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kecamatan Mataram, tingkat partisipasi kelembagaan koperasi di Pagesangan Barat sangat rendah, tercermin dari keberadaan hanya satu unit koperasi aktif yang tercatat pada tahun 2021 [AllStats Search]. Minimnya representasi koperasi aktif ini mengindikasikan lemahnya akses masyarakat terhadap mekanisme ekonomi kolektif yang seharusnya mampu memperkuat basis usaha kecil, termasuk dalam penyediaan pembiayaan mikro, kegiatan pembelian bersama, serta pembentukan jaringan distribusi produk lokal yang terorganisir. Hal ini menegaskan perlunya revitalisasi sistem ekonomi berbasis komunitas agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga di tingkat akar rumput.

Fenomena stagnasi aktivitas ekonomi produktif, yang beriringan dengan lemahnya pengorganisasian ekonomi masyarakat, turut memperbesar ketergantungan terhadap bantuan eksternal dalam bentuk program perlindungan sosial. Realitas ini tercermin melalui distribusi bantuan sosial berupa beras kepada sekitar 1.019 individu dari kelompok masyarakat kurang mampu [Etheses UIN Mataram, mataram.antaranews.com.], yang sekaligus menjadi indikator banyaknya penduduk berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Situasi ini mempertegas urgensi pembentukan platform ekonomi yang lebih berdaya tahan, mandiri, dan inklusif dalam mendukung kemandirian ekonomi warga melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Urgensi pembentukan koperasi di tengah masyarakat lokal perlu dipahami sebagai strategi fundamental dalam memperkuat basis ekonomi komunitas secara kolektif. Melalui eksistensinya sebagai entitas ekonomi berbasis solidaritas sosial, koperasi menghadirkan peluang yang signifikan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap dukungan permodalan usaha melalui sistem simpan-pinjam yang dikelola secara bersama. Di samping itu, mekanisme pembelian kolektif atau *bulk purchase* memberikan efisiensi dalam pengadaan barang dan kebutuhan usaha, sementara jalur pemasaran yang terintegrasi dan lebih terorganisasi memungkinkan produk-produk lokal memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar.

Lebih lanjut, koperasi tidak hanya berperan dalam ranah ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat kapasitas sosial masyarakat. Keterlibatan warga dalam pengelolaan koperasi memfasilitasi terbentuknya sistem kelembagaan komunitas yang inklusif dan partisipatif, yang pada gilirannya akan mendorong kemandirian ekonomi serta mempererat kohesi sosial di tingkat lokal. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab bersama dalam manajemen koperasi turut membentuk watak demokratis dalam praktik ekonomi komunitas.

Dalam konteks keterbatasan lahan pertanian yang menjadi tantangan struktural di kawasan seperti Pagesangan Barat, koperasi menyediakan ruang alternatif untuk mengembangkan potensi sektor non-agraris yang selama ini belum dioptimalkan. Usaha mikro dan informal seperti perdagangan lokal, produksi kerajinan tangan, serta jasa berbasis kebutuhan komunitas menjadi

segmen yang dapat difasilitasi melalui koperasi. Pemanfaatan potensi tersebut secara terorganisasi memungkinkan diversifikasi ekonomi masyarakat dan memperluas cakupan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Aspek penting lainnya dari koperasi terletak pada kemampuannya dalam membangun sistem keuangan mandiri yang akuntabel. Melalui penerapan pembukuan yang transparan serta pengelolaan dana yang akurat, koperasi berfungsi sebagai modal sosial dan kelembagaan yang menopang kelangsungan usaha para anggotanya. Keberadaan instrumen keuangan ini bukan hanya mendukung ekspansi aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antar anggota dan menciptakan budaya tata kelola yang sehat dan berkelanjutan dalam ekosistem usaha bersama.



Sumber: BPS Kecamatan Mataram 2023; Antara News 2024.

Luas Wilayah: Sekitar 63,82 Hektare Kelurahan Pagesangan Barat mencakup area geografis seluas kurang lebih 63,82 hektare, yang menunjukkan keterbatasan ruang secara fisik dalam konteks pengembangan kawasan. Luas lahan ini mengimplikasikan bahwa kelurahan tersebut termasuk dalam kategori wilayah dengan keterbatasan spasial yang cukup signifikan. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap kapasitas pengembangan infrastruktur publik, pemukiman penduduk, dan fasilitas sosial-ekonomi lainnya. Selain itu, keterbatasan ruang juga membatasi perluasan sektor-sektor produktif seperti kegiatan pertanian atau unit industri mikro, yang memerlukan ruang fisik yang memadai. Dalam analisis demografis, luas wilayah ini menjadi variabel penting dalam menentukan tingkat kepadatan penduduk dan perbandingan antara jumlah populasi dengan luas lahan yang tersedia.

Jumlah Penduduk: Sekitar 11.135 Jiwa Populasi Kelurahan Pagesangan Barat tercatat sekitar 11.135 jiwa, yang apabila dibandingkan dengan luas wilayahnya, menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi—diperkirakan mendekati atau bahkan melebihi 170 jiwa per hektare. Kepadatan yang signifikan ini memberikan tekanan terhadap penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap sumber daya

ekonomi. Selain itu, angka tersebut juga dapat menjadi indikator adanya potensi sumber daya manusia yang besar, yang apabila diberdayakan secara kolektif, dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal. Namun, tanpa adanya sistem pengelolaan yang terstruktur, kepadatan ini justru berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Lahan Pertanian Kering: Sekitar 75 Hektare Tercatat luas lahan pertanian kering mencapai kurang lebih 75 hektare, jumlah yang melebihi luas administratif kelurahan itu sendiri. Situasi ini mengisyaratkan kemungkinan adanya kekeliruan dalam pencatatan atau bisa jadi mencerminkan lahan pertanian yang berada di bawah pengelolaan warga Pagesangan Barat namun terletak di luar batas administratif kelurahan. Apabila data ini diambil sebagai valid, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lahan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Mengingat lahan tersebut merupakan pertanian kering, tantangan yang dihadapi kemungkinan besar mencakup keterbatasan irigasi, minimnya teknologi pertanian, serta belum tersedianya sistem pengelolaan yang efektif. Kondisi ini menyebabkan sektor agraris tidak dapat dijadikan tumpuan utama bagi penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Jumlah Koperasi Aktif (Tahun 2021): 1 Unit Data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya terdapat satu unit koperasi yang masih aktif beroperasi di Kelurahan Pagesangan Barat. Fakta ini mencerminkan lemahnya struktur kelembagaan ekonomi lokal, terutama dalam mengorganisasikan potensi ekonomi warga secara kolektif. Minimnya keberadaan koperasi mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pembiayaan mikro, penguatan usaha kecil menengah, dan kolaborasi dalam sistem distribusi serta pemasaran produk lokal. Absennya mekanisme ekonomi berbasis kolektif ini menjadi salah satu penyebab stagnasi pertumbuhan ekonomi di tingkat komunitas, serta mendorong ketergantungan terhadap sektor informal dan bantuan eksternal.

Jumlah Warga Penerima Bantuan Sosial: 1.019 Orang Sebanyak 1.019 warga tercatat sebagai penerima bantuan sosial, yang merepresentasikan hampir satu dari sepuluh penduduk kelurahan. Rasio ini menunjukkan tingginya tingkat kerentanan ekonomi di tengah masyarakat, serta menjadi refleksi dari belum efektifnya upaya pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Ketergantungan terhadap program bantuan sosial mengindikasikan kegagalan sistemik dalam menciptakan lapangan kerja, akses permodalan, dan pemberdayaan ekonomi secara merata. Oleh karena itu, diperlukan intervensi struktural yang mampu membangun ketahanan ekonomi komunitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan bersifat temporer.

Secara keseluruhan, seluruh indikator yang tercantum memperlihatkan keterkaitan yang saling memperkuat dalam membentuk gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial-ekonomi di Kelurahan Pagesangan Barat. Keterbatasan spasial yang berdampak pada padatnya jumlah penduduk, ketidakefektifan pemanfaatan lahan pertanian kering, serta lemahnya kelembagaan ekonomi seperti koperasi, saling berkelindan dalam membentuk struktur ekonomi lokal yang rapuh. Ketidakhadiran strategi kolektif dan minimnya kelembagaan komunitas telah menciptakan jurang antara potensi demografis dan realitas ekonomi, sehingga menyebabkan sebagian besar warga berada dalam posisi rentan. Interpretasi kualitatif dari keseluruhan data ini mengarah pada urgensi untuk mengembangkan model ekonomi berbasis komunitas yang berfokus pada kemandirian dan kolaborasi. Pembentukan koperasi yang kuat, penguatan literasi ekonomi warga, serta revitalisasi lahan kering menjadi elemen penting dalam mentransformasi kondisi sosial-ekonomi dari ketergantungan menuju kemandirian. Hanya dengan pendekatan struktural yang berkelanjutan dan partisipatif, ekosistem ekonomi lokal dapat tumbuh menjadi inklusif, resilien, dan berdaya saing.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa koperasi memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses modal dan rendahnya literasi keuangan. Penelitian Wulandari et al. (2021) menyatakan bahwa koperasi desa berperan penting dalam memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui penyediaan dana bergulir dan pelatihan manajemen keuangan. Studi lainnya oleh Setiawan & Rahmawati (2020) menemukan bahwa keberhasilan koperasi dalam meningkatkan pendapatan anggota sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan, transparansi manajemen, dan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks masyarakat kelurahan, koperasi juga terbukti menjadi solusi kolektif yang adaptif terhadap perubahan sosial dan tekanan ekonomi. Melalui model koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha (KSU), kelompok masyarakat dapat saling menopang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, modal usaha, dan distribusi hasil produksi. Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai penyangga ekonomi lokal yang tangguh dan mandiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam Pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Pemberdayaan dilakukan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan prioritas masyarakat.

Prinsip pemberdayaan dalam UU tersebut menekankan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal. Koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan tersebut, karena mendorong terjadinya distribusi kepemilikan ekonomi, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan kelembagaan warga secara berkelanjutan. Dalam konteks Kelurahan Pagesangan Barat, pembentukan koperasi selaras dengan semangat UU Desa yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan lokal untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan edukatif, di mana masyarakat menjadi subjek utama dalam setiap proses kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis warga terhadap pentingnya kemandirian ekonomi melalui wadah koperasi serta memastikan keberlanjutan koperasi yang dibentuk tidak hanya bergantung pada tim pengabdian, tetapi benar-benar dijalankan oleh komunitas sendiri.

Metode ini juga mengedepankan prinsip bottom-up, di mana program disusun berdasarkan hasil observasi langsung, kebutuhan nyata, serta potensi lokal yang ada di Kelurahan Pagesangan Barat. Pendekatan edukatif diterapkan melalui pelatihan dan penyuluhan, sedangkan pendekatan kolaboratif dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama periode Mei- Juni 2025. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara luring (offline) dengan menerapkan prinsip inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif.

Kegiatan pelatihan pembentukan koperasi di Kelurahan Pagesangan Barat melibatkan partisipasi multisektor yang mencerminkan keterwakilan beragam elemen masyarakat. Komposisi peserta terdiri dari warga setempat yang mencakup tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kalangan pemuda, serta pensiunan aparatur sipil

negara, yang keseluruhannya membawa perspektif dan kebutuhan yang beragam dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, kehadiran aparat kelurahan serta pengurus RT dan RW memperkuat dimensi kelembagaan kegiatan ini, menandakan keterpaduan antara masyarakat sipil dan struktur pemerintahan tingkat lokal dalam proses pemberdayaan ekonomi. Dukungan akademik juga hadir melalui keterlibatan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani yang berperan sebagai pendamping teknis dan fasilitator dalam proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, pelatihan ini diikuti oleh sekitar 35 peserta aktif yang menunjukkan antusiasme dan komitmen tinggi terhadap pembentukan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi komunitas. Dari jumlah tersebut, dilakukan proses seleksi dan penguatan kapasitas untuk membentuk tim inisiasi koperasi yang terdiri atas sembilan orang pengurus inti. Struktur tim tersebut meliputi posisi Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta Divisi Usaha yang dirancang secara fungsional guna mendukung efektivitas tata kelola organisasi koperasi. Komposisi ini tidak hanya mencerminkan partisipasi inklusif, tetapi juga menjadi landasan awal bagi pembentukan koperasi yang profesional, berdaya tahan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pembentukan koperasi di Kelurahan Pagesangan Barat dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut.

Pada tahap persiapan, langkah awal dimulai dengan kegiatan observasi lapangan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian untuk memahami secara menyeluruh kondisi sosial dan ekonomi warga. Proses ini mencakup pemetaan potensi lokal serta identifikasi terhadap akar permasalahan yang menjadi penghambat utama dalam pengembangan ekonomi komunitas. Guna memperkuat legitimasi dan keterlibatan multi-stakeholder, dilakukan pula proses koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak, antara lain Lurah Pagesangan Barat, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari Dinas Koperasi Kota Mataram. Komunikasi ini bertujuan untuk membangun dukungan kelembagaan serta menyatukan persepsi mengenai urgensi pembentukan koperasi. Tahapan ini diakhiri dengan penyusunan perangkat instruksional berupa modul pelatihan koperasi yang dikembangkan secara kontekstual berdasarkan temuan lapangan, termasuk materi pembukuan sederhana yang sesuai dengan kapasitas warga sasaran.

Memasuki tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui forum terbuka yang diselenggarakan di aula kelurahan. Dalam sesi ini, warga diperkenalkan dengan konsep dasar koperasi, prinsip-prinsip operasional, manfaat kolektif, serta studi kasus keberhasilan koperasi dari daerah lain sebagai inspirasi. Selanjutnya, warga difasilitasi untuk mengikuti diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) guna mengidentifikasi potensi usaha koperasi yang relevan dengan karakteristik lokal, menyusun visi dan misi koperasi, serta membentuk struktur awal organisasi. Pelatihan teknis juga diberikan secara mendalam, mencakup pemahaman prinsip koperasi, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), teknik pembukuan keuangan koperasi, serta mekanisme simpan pinjam dan manajemen unit usaha koperasi. Dalam semangat demokrasi partisipatif, pengurus koperasi dipilih secara terbuka oleh peserta pelatihan. Tim pengabdian kemudian memfasilitasi penyusunan dokumen legalitas seperti akta pendirian koperasi, pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan proses registrasi resmi ke Dinas Koperasi Kota Mataram.

Terakhir, pada tahap evaluasi dan tindak lanjut, dilakukan pengukuran terhadap efektivitas kegiatan melalui pre-test dan post-test guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap materi koperasi. Evaluasi ini menjadi dasar untuk melihat capaian awal dalam hal kapasitas individu dan kesiapan organisasi koperasi. Sebagai bagian dari pendampingan berkelanjutan, tim

melaksanakan monitoring intensif selama empat minggu setelah koperasi terbentuk, dengan fokus pada penguatan fungsi struktur organisasi dan pelaksanaan operasional awal. Untuk memastikan keberlanjutan program, disusunlah laporan akhir yang berisi rekomendasi strategis dalam bentuk *roadmap* pengembangan koperasi, yang kemudian diserahkan kepada pihak kelurahan dan instansi terkait sebagai pedoman penguatan kelembagaan koperasi di masa mendatang.

Prosedur pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kombinatorik yang mencakup teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan instrumen kuantitatif sederhana. Observasi langsung dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai aktivitas keseharian warga serta mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis koperasi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat pemerintahan kelurahan, serta pelaku usaha setempat guna menggali informasi strategis, persepsi sosial, dan kendala struktural yang dihadapi dalam konteks pemberdayaan ekonomi komunitas.

Untuk memperluas partisipasi dan menangkap dinamika ide-ide kolektif, kegiatan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) diselenggarakan dengan tujuan merumuskan alternatif model usaha koperasi yang relevan dengan karakteristik sosial dan sumber daya lokal. Di samping itu, pengukuran pengetahuan peserta dilakukan melalui penyebaran kuesioner pre-test dan post-test sebagai instrumen evaluatif terhadap peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan koperasi.

Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan teknik kuantitatif sederhana. Fokus analisis diarahkan pada perubahan tingkat pengetahuan peserta terhadap konsep dan operasional koperasi, asesmen terhadap kesiapan kelembagaan koperasi yang baru dibentuk, serta estimasi terhadap prospek keberlanjutan organisasi koperasi dalam jangka menengah dan panjang. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan interpretasi yang mendalam dan kontekstual, serta memberikan dasar bagi formulasi rekomendasi strategis ke depan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang difokuskan pada pembentukan *Koperasi Kelurahan Merah Putih* di wilayah Pagesangan Barat telah berhasil direalisasikan secara sistematis melalui rangkaian tahapan partisipatif yang melibatkan peran aktif berbagai unsur masyarakat. Proses pelaksanaan dimulai dari tahap sosialisasi hingga pelatihan teknis dan pembentukan struktur organisasi koperasi, seluruhnya menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi dari warga lokal. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta aktif dari berbagai latar belakang, yang selanjutnya diseleksi menjadi sembilan individu terpilih untuk mengisi posisi pengurus inti koperasi, mencakup jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta lima kepala divisi usaha yang dibentuk sesuai kebutuhan operasional koperasi.

Dalam proses pelatihan, peserta dibekali dengan modul pembelajaran yang dirancang secara aplikatif dan relevan dengan konteks lokal. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendasar mengenai prinsip-prinsip koperasi dan filosofi ekonomi kerakyatan, teknik penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), manajemen pembukuan serta penyusunan laporan keuangan, hingga perencanaan strategis untuk pengembangan unit usaha koperasi. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan simulasi agar peserta mampu memahami implementasi teknis secara praktis.

Evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dilakukan melalui pengukuran awal dan akhir berupa pre-test dan post-test. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sekitar 72% dari peserta belum

memiliki pemahaman yang memadai terkait konsep dasar koperasi maupun praktik pembukuan usaha. Namun, setelah mengikuti pelatihan intensif dan diskusi kelompok, terjadi peningkatan signifikan dalam penguasaan materi. Pada post-test, tercatat bahwa sebanyak 89% peserta telah mampu menjawab dengan benar mengenai prinsip manajemen koperasi dan menyusun simulasi laporan kas sederhana. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas pengetahuan peserta secara substantif dan menjadi indikator awal keberhasilan intervensi pelatihan dalam memperkuat kesiapan masyarakat membentuk dan mengelola koperasi secara profesional.

4.2. Dampak Terhadap Kapasitas Masyarakat

Keberhasilan kegiatan pengabdian dalam pembentukan *Koperasi Kelurahan Merah Putih* dapat diukur melalui sejumlah indikator substantif yang mencerminkan capaian strategis dari proses pemberdayaan masyarakat. Salah satu indikator utama adalah peningkatan signifikan dalam pemahaman warga terhadap konsep koperasi, fungsi kelembagaan ekonomi kolektif, serta prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaannya. Pemahaman ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam partisipasi aktif warga dalam setiap tahap kegiatan, termasuk diskusi, pelatihan, dan perumusan struktur koperasi.

Selain itu, terbentuknya struktur organisasi koperasi yang bersifat legal dan demokratis menjadi bukti konkret bahwa proses institusionalisasi kelembagaan berhasil dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola koperasi yang baik. Penyusunan struktur ini dilakukan melalui mekanisme pemilihan terbuka dan partisipatif, yang memperkuat legitimasi pengurus serta mempererat rasa kepemilikan kolektif terhadap koperasi yang dibentuk. Kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik pencatatan keuangan yang sistematis juga mengalami peningkatan, ditandai dengan antusiasme peserta dalam menyusun laporan kas dan memahami arus keuangan koperasi secara transparan.

Lebih dari sekadar capaian teknis, kegiatan ini juga telah membangun komitmen kolektif di kalangan warga untuk menjalankan koperasi secara mandiri sebagai instrumen ekonomi jangka panjang. Dalam proses diskusi dan pemetaan potensi, muncul berbagai ide usaha yang relevan dengan kebutuhan komunitas, seperti layanan simpan pinjam yang disesuaikan dengan kebutuhan harian, pembentukan toko kelontong berbasis kolektif, serta unit usaha jasa pengelolaan limbah rumah tangga. Gagasan-gagasan ini mencerminkan semangat kemandirian dan inovasi lokal yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelembagaan ekonomi dalam melindungi kesejahteraan keluarga, khususnya dari risiko finansial akibat praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini umum ditawarkan oleh lembaga keuangan informal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wahana ekonomi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial dan pemberdayaan warga secara berkelanjutan.

Walaupun keseluruhan rangkaian kegiatan pembentukan *Koperasi Kelurahan Merah Putih* dapat terlaksana dengan baik dan menunjukkan respons positif dari masyarakat, terdapat sejumlah tantangan substantif yang muncul selama proses implementasi dan perlu menjadi perhatian dalam tahap pengembangan selanjutnya. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya tingkat literasi digital dan pemahaman dasar tentang akuntansi di kalangan sebagian pengurus koperasi. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis digital yang sebenarnya diperlukan untuk mewujudkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan koperasi.

Selain aspek kompetensi teknis, kendala lain yang cukup menonjol adalah keterbatasan modal awal yang dapat dihimpun secara kolektif oleh anggota. Meskipun semangat partisipasi warga cukup tinggi, namun kapasitas finansial yang terbatas menjadi penghalang dalam menyektor modal usaha secara optimal, yang pada akhirnya membatasi skala awal operasional koperasi. Di

sisi lain, kelembagaan koperasi yang baru terbentuk masih memerlukan penguatan lanjutan agar dapat beroperasi secara stabil dan mandiri dalam jangka menengah hingga panjang. Untuk itu, intervensi berupa pendampingan lanjutan yang bersifat sistematis dan berjangka waktu dinilai sangat penting guna memastikan koperasi mampu tumbuh sebagai entitas ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak dipandang sebagai hambatan semata, melainkan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan. Keberadaan hambatan tersebut justru menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah proses instan, melainkan memerlukan waktu yang cukup, pendekatan pendampingan yang intensif, serta keterlibatan aktif warga secara konsisten. Dengan demikian, pengalaman ini memberikan landasan reflektif yang penting dalam merumuskan strategi penguatan koperasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui inisiasi *Koperasi Kelurahan Merah Putih* di wilayah Pagesangan Barat telah berjalan secara optimal dan menunjukkan kontribusi konkret dalam upaya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Capaian utama dari kegiatan ini dapat dilihat dari tingginya keterlibatan warga dalam setiap tahapan program, peningkatan pengetahuan mengenai tata kelola koperasi, hingga terbentuknya struktur organisasi koperasi yang sah secara hukum dan dibangun atas asas demokrasi partisipatif. Keberhasilan ini menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal, terutama melalui mekanisme pengelolaan keuangan bersama, distribusi kebutuhan pokok secara kolektif, serta pembentukan sistem keuangan mikro yang menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas sosial.

5. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan dinamika lapangan yang terjadi, sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas koperasi ke depan:

1. Perluasan Pendampingan Teknis Berkelanjutan Diperlukan program pendampingan secara berkala selama minimal enam bulan pertama sejak koperasi terbentuk. Langkah ini penting untuk memastikan aspek operasional dan administratif koperasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, serta mampu mengantisipasi hambatan awal yang mungkin muncul.
2. Penguatan Kapasitas Akuntansi dan Literasi Digital Pelatihan lanjutan dalam bidang pembukuan koperasi dan keterampilan digital perlu diselenggarakan, baik bagi pengurus maupun anggota. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pencatatan keuangan yang tertib, akurat, dan berbasis teknologi sederhana yang mudah diakses oleh seluruh elemen koperasi.
3. Penguatan Jejaring dan Sinergi Lintas Sektor Perlu dibangun kemitraan yang lebih solid antara koperasi dengan Dinas Koperasi Kota Mataram, pemerintah kelurahan, serta institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Kolaborasi ini penting tidak hanya untuk aspek legalitas dan supervisi kelembagaan, tetapi juga dalam mendorong inovasi dan pengembangan unit-unit usaha koperasi.
4. Pengembangan Usaha Berbasis Kebutuhan Riil Warga Unit usaha koperasi yang selaras dengan kebutuhan lokal, seperti warung sembako kolektif, jasa kebersihan lingkungan, atau layanan

simpan pinjam harian, harus segera diwujudkan. Langkah ini akan mempertahankan antusiasme anggota dan mempercepat proses kemandirian ekonomi koperasi.

5. Evaluasi Dampak Kesejahteraan secara Berkala Perlu dilakukan pengukuran berkala terhadap dampak koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi warga. Evaluasi ini akan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa koperasi benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi kerakyatan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Departemen Koperasi dan UKM. (2021). Pedoman pendirian koperasi bagi masyarakat. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM [2025] .Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nomor :1 Tahun 2025.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia [2025] .Surat Edaran Nomor;500.3/2438/SJ Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Kemenkumham.
- Mardikanto, T. (2014). Pemberdayaan masyarakat: Konsep, strategi, dan implementasi. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2020). Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, H. (2021). Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi lokal. Yogyakarta: Deepublish.
- Suharto, E. (2009). Pembangunan, pemberdayaan, dan masyarakat madani. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.